

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan entitas pelapor yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan disusun sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, efektif serta transparan merupakan kewajiban dari suatu entitas pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan pengambil keputusan.

Dalam pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bermanfaat dan sesuai bagi kebutuhan para pengguna. Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah pengelola keuangan pada organisasi perangkat daerah tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga bentuk pertanggung jawaban penyajian laporan keuangan harus

memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar (Afifah,2019). Dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dalam setiap tahunnya. Opini BPK diberikan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara dengan tujuan untuk mendapatkan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Ada empat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan tidak memberi pendapat (TMP). Hasil temuan pemeriksaan BPK atas 542 (100%) LKPD TAHUN 2019, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Pada kenyataannya dari seluruh LKPD, yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Fenomena yang terkait kualitas laporan keuangan Kabupaten Kudus adalah Pada Juli 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kudus M Tamzil sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Kudus, KPK juga menjerat staf khusus bupati kudus, dan pelaksanaan

Sekretaris Dinas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD). Walaupun ada kejadian tersebut pemerintah Kabupaten Kudus masih bisa mempertahankan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Republika.co.id, 2019). Dalam sebuah pemerintah daerah harus dipimpin dengan orang yang memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan bisa dicontoh oleh pegawainya, karena hal tersebut akan mempengaruhi anggota organisasinya. Pemkab Kudus berupaya meningkatkan kinerja tanpa mempermasalahkan keterbatasan sumber daya manusia, namun dengan pernyataan tersebut tetap harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi yang ada di suatu instansi pemerintah. Kompetensi tersebut mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi (solopos.com, 2019).

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karakteristik laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan daerah bisa dikatakan berkualitas jika informasi yang ada didalam laporan keuangan tersebut bisa digunakan oleh pengguna sebagai referensi dalam mengambil keputusan yang tepat (Nahar dkk, 2018). Berikut

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Keberhasilan dan kinerja karyawan di bidang pekerjaan tertentu sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmen mereka terhadap bidang pekerjaan yang ditempati (Adrian dkk, 2019). Manajemen keuangan pemerintah yang baik didukung oleh unit kerja yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang akuntansi, menghadiri pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat memahami logika akuntansi dengan baik dalam menerapkan sistem akuntansi.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati, (2016), Oktavia dan Rahayu, (2019), Afifah, (2019), Putri, (2019), Aulia dkk, (2019), Agung dan Gayatri, (2018), Adrian dkk, (2019), Jatmiko dkk, (2020) dan Kurniawati dkk, (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo, (2019) dan Fauzi, (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ada hal yang mendasar dan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sistem akuntansi daerah. Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APDB, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu, (2019) dan Mokoginta dkk, (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Suhardjo, (2019) dan Fauzi, (2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan daerah.

Sistem pengendalian intern merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Sistem Pengendalian intern menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan, karena kegiatan operasional memerlukan kebijakan yang mampu mengatur dan memberikan ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatan (Fauzi, 2020). Sistem pengendalian intern memiliki fungsi sebagai pemeriksa keandalan dan ketelitian dari informasi keuangan. Sistem pengendalian diselenggarakan dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,

menjamin kehandalan suatu laporan keuangan dan data keuangan suatu instansi pemerintahan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjo, (2019), Kiranayanti dan Erawati, (2016), Putri, (2019), Aulia dkk, (2019), Nahar dkk, (2018), Agung dan Gayatri, (2018), Adrian dkk, (2019), Mardani dan Suhartono, (2019), Fauzi, (2020), dan Jatmiko dkk, (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Mokoginta dkk, (2017) dan Afifah, (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor keempat. Teknologi informasi adalah media yang digunakan untuk memperoleh, menyusun, menyimpan, mengolah data, memproses dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi relevan, akurat, tepat waktu, dan berkualitas, yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah (Rusdiana dan Irfan, 2014). Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Aulia dkk, 2019).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia dkk, (2019) dan Agung dan Gayatri, (2018), Adrian dkk, (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Sitepu dan Chartady, (2020), Fauzi, (2020) dan Jatmiko dkk, (2020) Menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan .

Komitmen organisasi merupakan faktor kelima. Komitmen organisasi adalah situasi di mana seorang karyawan berpihak pada organisasi tertentu dan tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (Adrian dkk, 2019). Menurut (Adrian dkk, 2019) ada tiga sikap dalam berkomitmen terhadap organisasi: (1) identifikasi dengan tujuan organisasi, (2) perasaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi, dan (3) perasaan loyalitas kepada organisasi.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sitepu dan Chartady, (2020), Widari dan Sutrisno, (2017) dan Agung dan Gayatri, (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Oktavia dan Rahayu, (2019) dan Adrian dkk, (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Gaya kepemimpinan merupakan faktor keenam. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk tujuan tertentu (Agung dan Gayatri, 2018). Jadi dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah sikap dari

seorang pemimpin yang mampu memimpin dengan baik dan dapat memberikan motivasi kepada anggotanya agar tujuannya tercapai.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Agung dan Gayatri, (2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Afifah, (2019) gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suhardjo, 2019). Dari perbedaan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan. Alasan penambahan variabel ini pemanfaatan teknologi informasi, karena pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Penambahan variabel komitmen organisasi, komitmen organisasi adalah di mana keadaan seorang karyawan berpihak pada organisasi dan tujuannya serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Seorang karyawan mempunyai komitmen besar terhadap organisasi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penambahan variabel gaya kepemimpinan, Seorang pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan baik yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi sehingga akan berpengaruh juga pada kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya. Semakin baik cara memimpin seorang dalam pimpinan sebuah organisasi maka kualitas laporan keuangan daerah meningkat. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan Suhardjo di Kabubapten Semarang dan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).”



1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, penelitian ini akan membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variable independen kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem akuntansi keuangan daerah (X_2), sistem pengendalian intern (X_3), pemanfaatan teknologi informasi (X_4), komitmen organisasi (X_5), dan gaya kepemimpinan (X_6) sebagai variabel independen, sedangkan kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen
2. Objek penelitian akan difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas kualitas laporan keuangan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pengguna sebagai referensi dalam mengambil keputusan yang tepat. maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

5. Apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
6. Apakah gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data sebagai sumber informasi dan gambaran mengenai kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus

Dapat menjadi masukan atau bahan acuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari laporan keuangan pemerintah.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana dan informasi dan juga diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kualitas laporan keuangan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan informasi bagi hasil peneliti lain, sehingga dapat mempermudah peneliti yang akan datang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah laporan keuangan pemerintah daerah .